

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERH KABUPATEN WAJO

Andi Nadrah Ainun Jariyah

[andinadrahai@gmail.com](mailto:andinadrahai@gmail.com)

Nur Afiah

[nurafiah@unm.ac.id](mailto:nurafiah@unm.ac.id)

Hajrah Hamzah

[hajrah.hamzah@unm.ac.id](mailto:hajrah.hamzah@unm.ac.id)

### Abstract

*This study aimed: to analyze how the financial performance of the local government at the Wajo Regency Regional Revenue and Management Agency in 2021-2023. The variables of this study are: financial performance value for money. The focus of the study is to evaluate financial performance to determine whether the performance has met the budget target with quantitative analysis techniques. Data collection was carried out using documentation and interviews, data analysis using economic, efficiency and effectiveness ratios. The results show that the level of economy and efficiency during the study period is quite good because the ratio is below 100%. However, effectiveness in 2021-2022 has not been achieved (ratio <100%), while in 2023 it has shown effective performance (ratio > 100%).*

**Keywords:** Financial Performance, Regional Revenue and Exdititure Budget

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan: untuk menganalisis bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo pada Tahun 2021-2023. Variabel penelitian ini adalah: kinerja keuangan. Fokus penelitian adalah: mengevaluasi kinerja keuangan untuk menentukan apakah kinerja tersebut telah memenuhi target anggaran dengan teknik analisis kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumentasi dan wawancara, analisis data menggunakan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Hasil menunjukkan bahwa tingkat ekonomis dan efisiensi selama periode penelitian tergolong baik karena rasio berada di bawah 100%. Namun, efektivitas pada tahun 2021–2022 masih belum tercapai (ratio <100%), sedangkan pada 2023 telah menunjukkan kinerja yang efektif (ratio >100%).

**Kata kunci:** Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja

## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara berkembang, perkembangan ini diikuti oleh pertumbuhan pesat organisasi swasta dan sektor publik, baik ditingkat pusat maupun daerah. Dengan semakin banyaknya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik,

kinerja instansi pemerintah menjadi perhatian bagi masyarakat. Untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, pemerintah daerah diberikan otoritas lokal (otonomi daerah) untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional.

Otonomi daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia disebutkan: "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Salah satu indikator yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah semakin baik itu dapat dilihat dari pendapatan asli daerah. Menurut Rahman & Restiatun (2023) pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Masyarakat harus lebih cerdas dan berpikir kritis tentang kinerja pemerintah daerah terutama transparansi dan akuntabilitas publik lembaga sektor publik untuk mencegah adanya penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan.

Organisasi sektor publik sering dianggap sebagai tempat pemborosan, inefisiensi, kebocoran dana, dan sektor publik yang selalu mengalami kerugian. Sebagian besar pelayanan publik di Indonesia masih memiliki kualitas buruk, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya profesionalisme petugas yang bekerja di organisasi pelayanan. Ini menunjukkan bahwa semua orang harus memperhatikan peran petugas langsung dalam pelayanan publik. Berdasarkan Alaslan dkk, (2023) bahwa penamaan "organisasi sektor publik" mengacu pada entitas yang beroperasi di bawah payung pemerintah dan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan publik, mengelola sumber daya publik, dan menjalankan fungsi pemerintahan lainnya yang berkontribusi pada kesejahteraan umum.

Untuk menentukan seberapa besar pengeluaran publik menghasilkan nilai terbaik bagi masyarakat, metode *value for money* dapat digunakan. Metode ini mengevaluasi bagaimana biaya yang dikeluarkan, hasil yang dicapai, dan efisiensi proses pelaksanaan berhubungan satu sama lain.

Menurut Mardiasmo (2018) ide nilai uang menjadi dasar untuk menilai kinerja organisasi pemerintah, dengan penekanan pada tiga faktor utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Jadi, penting untuk melakukan evaluasi kinerja dengan mempertimbangkan konsep *value for money* karena memiliki manfaat dalam meningkatkan efisiensi layanan publik, memastikan bahwa layanan diberikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, meningkatkan kualitas layanan publik, dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan uang publik sebagai landasan dari akuntabilitas publik.

Pemerintah daerah Indonesia memiliki lembaga teknis bernama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. BPKPD mendukung pemerintahan daerah melalui pengelolaan sumber daya keuangan yang transparan dan akuntabel. BPKPD membantu pemerintah daerah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk berbagai proyek pembangunan yang menguntungkan masyarakat.

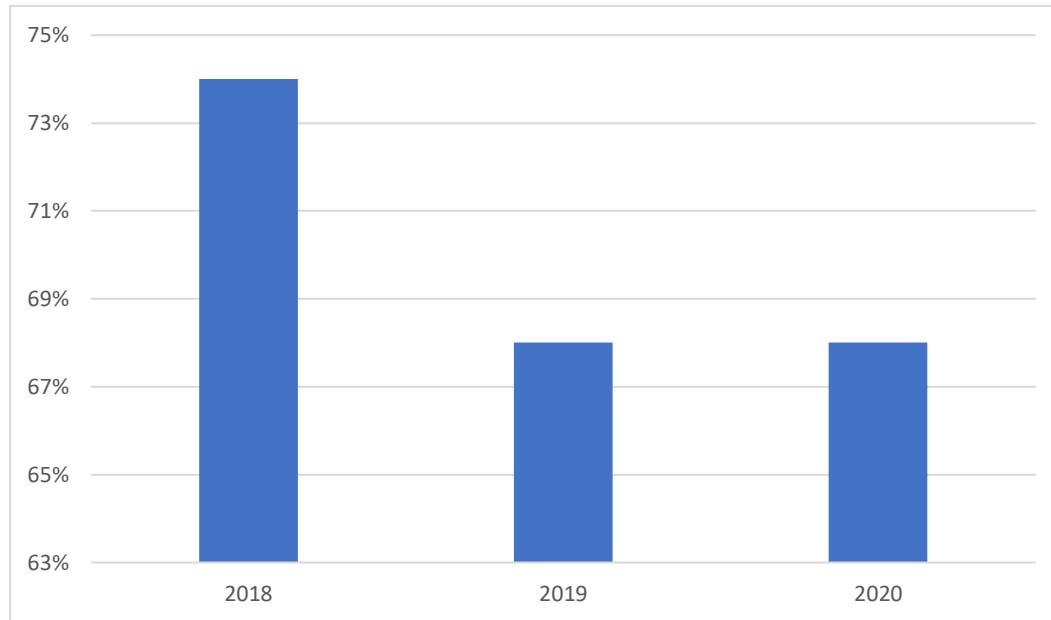
Kabupaten Wajo menjalankan otonomi daerah dan menetapkan visi dan misi untuk pembangunan dan kemajuan. Perwujudannya pasti membutuhkan banyak biaya. Salah satu komponen APBD yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah adalah pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Pendekatan *Value for Money* menjadi relevan dalam menilai sejauh mana penggunaan anggaran di Kabupaten Wajo telah mencapai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E). *Value for Money* menekankan pada bagaimana setiap pengeluaran pemerintah daerah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Dalam konteks ini, analisis terhadap efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan angka rata-rata 103,3% selama periode 2018–2020, yang mengindikasikan pengelolaan yang cukup baik. Namun, hal ini masih belum cukup untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dan meningkatkan otonomi fiskal daerah.

Tabel 1 Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2018-2020

Tahun	Pendapatan Daerah (Rp)	Dana Perimbangan (Rp)	Kontribusi Pendapatan Transfer (%)
2018	1.407.603.616.014	1.047.331.470.105	74%
2019	1.575.433.188.853	1.075.874.461.764	68%
2020	1.439.325.665.627	987.724.168.969	68%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2025 (data diolah)



Gambar 1 Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2018-2020

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2025 (data diolah))

Dari tabel di atas, terlihat bahwa meskipun total pendapatan daerah Kabupaten Wajo mengalami peningkatan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, kontribusi dana perimbangan tetap mendominasi struktur pendapatan daerah. Pada tahun 2019, dana perimbangan masih menyumbang sekitar 68% dari total pendapatan daerah. Tren ini berlanjut pada tahun 2020, di mana kontribusi dana perimbangan tercatat sebesar 68% dari total pendapatan daerah, meskipun secara nominal pendapatan daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan Kabupaten Wajo terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi dan konsisten selama periode 2018–2020. Ketergantungan fiskal yang tinggi ini mengindikasikan perlunya strategi penguatan kapasitas fiskal daerah, terutama melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Peningkatan PAD akan berperan penting dalam menciptakan kemandirian fiskal dan mengurangi risiko terhadap fluktuasi transfer dari pusat.

Oleh karena itu, dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, perlu ada perhatian lebih terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih optimal. Pemanfaatan sumber daya daerah yang tepat guna dan berkelanjutan dapat memperkecil ketergantungan pada dana perimbangan, sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mewujudkan pembangunan yang lebih mandiri. Dalam konteks ini, penerapan prinsip *Value for Money* menjadi sangat penting untuk memastikan setiap alokasi anggaran tidak hanya efisien, tetapi juga efektif dan ekonomis.

Dalam penerapan *Value for Money*, efisiensi dapat diukur melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah untuk meningkatkan PAD tanpa meningkatkan beban biaya yang tidak perlu. Efektivitas mengacu pada pencapaian target-target pembangunan daerah yang sesuai dengan alokasi anggaran. Sementara itu, ekonomisasi mengarah pada bagaimana setiap rupiah yang digunakan memberikan hasil maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah Kabupaten Wajo perlu mengeksplorasi lebih lanjut potensi ekonomi lokal, mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengembangkan inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan berbasis digital. Dengan demikian, penerapan prinsip *Value for Money* dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode *Value For Money* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo”

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### **Value for Money**

*Grand theory* dalam penelitian ini adalah *value for money*, yang merupakan konsep yang sangat relevan dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik. Menurut Setyaningrum (2017), *value for money* merujuk pada prinsip pengelolaan keuangan yang berfokus pada tiga unsur utama, yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. Ketiga unsur ini menjadi dasar penting dalam menilai apakah dana yang dikeluarkan oleh organisasi sektor publik dapat menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

*Value for Money* merupakan sebuah *grand theory* yang sangat relevan dalam konteks pemerintahan, karena digunakan untuk menilai sejauh mana penggunaan anggaran negara dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik seperti uang, waktu, dan tenaga secara efisien, efektif, dan ekonomis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat. *Value For Money* didasarkan pada tiga pilar utama yang dikenal sebagai *3E*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis berkaitan dengan bagaimana pemerintah memperoleh barang dan jasa dengan biaya serendah mungkin tanpa mengorbankan kualitas. Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya yang digunakan dapat menghasilkan *output* secara maksimal. Sementara itu, efektivitas menilai seberapa besar *output* tersebut dapat mencapai tujuan kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, prinsip *equity* atau keadilan juga ditambahkan untuk memastikan bahwa hasil dari program pemerintah dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Penerapan *Value for Money* dalam pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelayanan publik, sekaligus mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran negara.

Dalam pengukuran kinerja, konsep *value for money* adalah indikator kinerja sektor publik yang menunjukkan apakah pengeluaran anggaran menghasilkan nilai tertentu bagi masyarakat. Indikator yang dimaksud adalah sederhana, efektif, dan efisien. (Kementerian Keuangan, 2024)

Menurut Mardiasmo (2018) tujuan dari pengukuran kinerja dengan menggunakan *value for money* adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan juga

dapat memperbaiki kinerja dari pemerintahan yang diukur dengan indikator ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis, pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah.

Berdasarkan Pratama, Syamsuddin, & Difa (2022) konsep *value for money* mengacu pada tiga hal utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis berarti mendapatkan *input* dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga terendah. Ekonomis berkaitan dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat mengurangi jumlah *input* sumber daya yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Perbandingan *input* dan *output* dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan dikenal sebagai efisiensi. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan targetnya. Secara sederhana, efektivitas didefinisikan sebagai perbandingan hasil dengan *output*.

Bisnis dapat mencapai *value for money* dengan menggunakan biaya *input* paling kecil untuk menghasilkan *output* terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Meningkatnya tuntutan akan akuntabilitas publik dan *good governance* mendorong penerapan konsep *value for money* pada organisasi sektor publik. Ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor publik.

Konsep *value for money* sangat penting dalam konteks sektor publik karena menyangkut penggunaan uang negara atau dana publik yang berasal dari pajak masyarakat. Setiap pengeluaran harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. *Value for money* tidak hanya sekedar menghitung biaya yang dikeluarkan, tetapi juga memastikan bahwa uang yang digunakan memberikan hasil yang optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dihargai dan digunakan sesuai dengan kebutuhan, dengan menghindari pemborosan dan memaksimalkan manfaat yang dihasilkan.

## **Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia. Ini mencakup rencana pendapatan dan pengeluaran untuk satu tahun anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. APBD ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan manajemen, ditunjukkan secara finansial. Tujuan utama anggaran adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi pendapatan, yang membantu mencapai tujuan keuangan. (Mahmudi, 2016a).

Menurut Nurkholis & Khusaini (2019) anggaran sektor publik dirancang untuk memastikan ketersediaan air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, anggaran sektor publik mempertimbangkan perubahan prioritas untuk kebutuhan dan kegiatan masyarakat. Pendapatan daerah adalah uang yang diterima oleh pemerintah daerah melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar selama periode pelaporan yang diikuti oleh transaksi. (Pratiwi & Pamungkas, 2018)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Nasution (2023) yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, adalah “rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia. Tahun APBD berlangsung selama satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember”. APBD memainkan peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan cara yang menguntungkan masyarakat.

Berdasarkan dari pendapat di atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kumpulan kebijakan pemerintah daerah yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, APBD juga berfungsi sebagai alat untuk pemangku kepentingan tertentu untuk menilai kemampuan daerah dari sisi pendapatan dan pengeluaran.

## Laporan Keuangan Daerah

Informasi tentang kondisi keuangan disebut laporan keuangan, dan informasi ini dapat digunakan sebagai gambaran kinerja keuangan. Laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi tentang posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Diharapkan bahwa laporan keuangan akan membantu pengguna (*user*) membuat keputusan finansial yang tepat. (Hidayat, 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah pada pasal 1(1) menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Setiap entitas pelaporan memiliki kewajiban untuk menyampaikan upaya dan hasil yang dicapai dalam melaksanakan kegiatan secara terstruktur dan sistematis selama periode pelaporan untuk berbagai kepentingan, yang meliputi:

1) Akuntabilitas

Bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

2) Manajemen

Membantu pengguna laporan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan oleh entitas pelaporan dalam periode tersebut, sehingga mempermudah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan alasan bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara lengkap dan terbuka mengenai pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antar generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu pengguna laporan untuk memahami kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan, serta apakah generasi mendatang juga akan turut menanggung beban pengeluaran tersebut.

### Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu teori atau kerangka teoretis yang berperan sebagai sumber tambahan dalam penelitian. Dalam konteks ini, studi penelitian dapat diarahkan untuk dua tujuan utama. Pertama, mengembangkan dan menghasilkan teori baru yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang suatu fenomena. Kedua, menguji dan mengvalidasi teori-teori yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat memperkuat atau mungkin merevisi pemahaman yang sudah ada. Dengan demikian, kerangka konseptual memainkan peran penting dalam membimbing proses penelitian dan analisis. (Creswell & Poth, 2018).

*Value for money* adalah konsep yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya, baik dalam sektor publik maupun swasta. Konsep ini menggambarkan hubungan yang optimal antara biaya yang dikeluarkan dan sumber daya yang digunakan, serta manfaat dan hasil yang diperoleh dari suatu kegiatan atau proyek.

Dalam konteks ini, *value for money* tidak hanya berfokus pada pengeluaran yang rendah, tetapi juga pada pencapaian hasil yang maksimal dari setiap unit sumber daya yang digunakan. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu melihat bagaimana proses transformasi *input* menjadi *output* berlangsung. *Input* dapat berupa berbagai macam sumber daya, seperti uang, tenaga kerja, waktu, dan material. Aktivitas kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengolah *input* tersebut menjadi *output* yang diinginkan baik itu produk, layanan, atau hasil lainnya. Peneliti perlu mengukur seberapa ekonomis, efisien, dan efektifnya proses ini untuk memfasilitasi pemahaman, kerangka pemikiran berikut diberikan untuk menggambarkan pola pikir dalam penelitian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan banyak angka, mulai dari pengumpulan data hingga penafsirannya. Metode ini juga merupakan studi mendalam yang memperhatikan semua fakta. (Abdullah, dkk, 2022)

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi tertentu dari subjek yang diteliti serta untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Wajo dengan menggunakan metode *value for money* yang meliputi aspek ekonomis, efisien, dan efektif. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun 2021 hingga 2023.

Subjek penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), yang berperan sebagai institusi utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BPKPD dengan menggunakan metode *value for money*, yang mencakup penilaian aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana BPKPD mampu mengelola sumber daya keuangan secara optimal untuk memberikan manfaat maksimal bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Fokus penelitian adalah inti dari pengalaman peneliti atau pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Wajo dari tahun 2021–2023 untuk menentukan apakah kinerja tersebut telah memenuhi target anggaran secara ekonomis, efisien, dan efektif. (Moleong, 2018)

Analisis data adalah langkah penting dalam penelitian karena dapat memberikan makna pada data yang dikumpulkan peneliti. Metode analisis deskriptif digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini. Pada tahap awal, data sampel dikumpulkan dari dokumen laporan keuangan. Data kemudian diproses dan dihitung untuk menggambarkan kondisi

kinerja keuangan. Hasil perhitungan rasio kemudian disusun dalam bentuk analisis deskriptif guna menjelaskan makna dari angka-angka yang diperoleh dari hasil perhitungan tersebut. Data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan hasil perhitungan rasio dengan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2021–2023.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan adalah teknik pengumpulan data yang paling tepat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar *valid* dan dapat diandalkan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo adalah data sekunder dan primer yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data tentang hal atau variabel seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Data yang digunakan merupakan Laporan Realisasi Anggaran Kab. Wajo pada tahun 2021–2023.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk interaksi yang dilakukan dengan tujuan tertentu, melibatkan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban. Peneliti akan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data tambahan jika diperlukan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini, analisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Wajo mengevaluasi seberapa jauh kemajuan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sektor keuangan pemerintah daerah pada tahun 2021-2023. Metode yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo pada penelitian ini adalah metode *Value For Money* dengan Rasio Ekonomis, Rasio Efisiensi, dan Rasio Efektivitas. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Wajo menyediakan Laporan Realisasi Anggaran yang menjadi sumber data

penelitian ini. Dari angka-angka tersebut, dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo. Adapun hasil dari Metode *Value For Money* yaitu:

### Rasio Ekonomis

Rasio Ekonomis merupakan perolehan sumber daya (*input*) tertentu dengan harga terendah. Ekonomis terkait sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Untuk mengukur tingkat ekonomis memerlukan data anggaran biaya dan realisasi biaya. (Mardiasmo, 2018: 5)

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016b) Ekonomis merupakan penghematan anggaran untuk memperoleh *input* dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam kegiatan operasional. Anggaran belanja dianggap sangat ekonomis jika hasil perbandingan lebih dari seratus persen. Kriteria ekonomis sebagai berikut:

- Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) maka, ekonomis.
- Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) maka, ekonomis berimbang.
- Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) maka tidak ekonomis.

Rasio Ekonomis Kabupaten Wajo tahun 2021-2023 sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Ekonomis Kabupaten Wajo 2021-2023

Tahun	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Ekonomis (%)	Kriteria
2021	1.390.432.771.050	1.296.455.698.249	93,24	Ekonomis
2022	1.311.135.081.849	1.186.998.874.515	90,53	Ekonomis
2023	1.381.892.727.781	1.279.303.056.629	92,57	Ekonomis

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Wajo selama tiga tahun terakhir secara konsisten berada di bawah target anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menghasilkan rasio ekonomis yang tinggi, yaitu 93,24% pada tahun 2021,

90,53% pada tahun 2022, dan 92,57% pada tahun 2023, yang seluruhnya termasuk dalam kategori “ekonomis.” Rasio ini mengindikasikan bahwa pemerintah mampu melaksanakan kegiatan dan program pembangunan dengan efisiensi biaya tanpa melebihi anggaran yang direncanakan. Tingginya rasio ekonomis ini menjadi indikator penting dalam mendukung pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), karena menunjukkan bahwa anggaran publik dapat dikelola secara hemat dan terkontrol. Pengembangan SIPKD umumnya membutuhkan belanja modal dan operasional, seperti pengadaan perangkat keras, lisensi perangkat lunak, pelatihan SDM, serta pemeliharaan sistem. Jika seluruh pengeluaran ini dapat dikelola secara ekonomis, maka pemerintah daerah memiliki peluang untuk meningkatkan fitur, memperluas cakupan integrasi antar instansi, atau memperkuat keamanan sistem informasi tanpa perlu menambah beban anggaran secara signifikan. Dengan demikian, rasio ekonomis yang tinggi menjadi indikator awal bahwa penguatan SIPKD dapat dirancang secara efisien dan memberikan manfaat maksimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Sebelum diterapkannya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), pengelolaan keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Wajo masih bersifat manual atau semi-digital. Hal ini berdampak pada tingginya biaya operasional rutin, seperti pengadaan alat tulis kantor, kertas, serta tenaga tambahan untuk pengolahan data secara manual. Selain itu, kesalahan dalam *input* data sering terjadi, sehingga memerlukan perbaikan berulang yang juga meningkatkan pengeluaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomis. Setelah SIPKD mulai diterapkan, proses administrasi keuangan menjadi lebih terstruktur dan terintegrasi. Penggunaan dokumen fisik berkurang secara signifikan, dan kesalahan *input* dapat diminimalkan melalui sistem yang lebih andal. Dengan demikian, belanja pemerintah dapat dilakukan secara lebih hemat dan tepat sasaran, serta menunjukkan peningkatan pada sisi ekonomis dalam pengelolaan anggaran.

## Rasio Efisiensi

Menurut Bastian (2017) rasio efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Membandingkan besarnya biaya yang dikeluarkan denda dengan biaya yang dikeluarkan denda.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016b), pencapaian *output* yang maksimal dengan menggunakan *input* yang paling terendah. Kriteria efisiensi sebagai berikut:

- a) Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) maka, efisien.
- b) Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) maka, efisien berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) maka, tidak efisien.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Kabupaten Wajo 2021-2023

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2021	1.469.701.973.295	1.296.455.698.249	88,21	Efisien
2022	1.439.414.593.642	1.186.998.874.515	82,46	Efisien
2023	1.519.047.240.030	1.279.303.056.629	84,21	Efisien

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 3 menjelaskan rasio efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Wajo, yang dihitung dari perbandingan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Selama periode 2021 hingga 2023, nilai rasio efisiensi berada dalam kategori "Efisien" dengan angka berturut-turut 88,21%, 82,46%, dan 84,21%. Artinya, pemerintah berhasil mengelola belanja dengan tetap mempertahankan keseimbangan terhadap pendapatan yang tersedia, tanpa mengalami defisit yang besar atau pengeluaran yang tidak terkendali.

Dalam konteks pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), efisiensi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk kegiatan penguatan

sistem informasi telah disesuaikan dengan kapasitas keuangan daerah. Efisiensi keuangan memberikan sinyal bahwa proyek-proyek digitalisasi keuangan, seperti pengembangan atau pembaruan SIPKD, dapat dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan dana yang tersedia secara bijak. Misalnya, pemerintah dapat memprioritaskan pengembangan modul-modul penting yang berdampak langsung terhadap transparansi dan integrasi pelaporan antar sektor. Selain itu, efisiensi membuka peluang bagi keberlanjutan sistem, karena proyek-proyek yang dirancang dan dilaksanakan secara efisien lebih mungkin untuk dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan tanpa membebani fiskal daerah. Dengan kata lain, rasio efisiensi mendukung sinergi antara perencanaan anggaran dan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan berbasis teknologi yang terukur dan bertanggung jawab.

Dari sisi efisiensi, sebelum adanya SIPKD, proses pencairan dana dan pelaporan keuangan memerlukan waktu yang lama karena melalui tahapan verifikasi manual yang kompleks. Laporan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus diserahkan dalam bentuk cetak dan sering kali tidak seragam, sehingga menyulitkan konsolidasi di tingkat BPKPD. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga memperbesar risiko keterlambatan pencairan anggaran dan pelaporan. Setelah SIPKD diterapkan, seluruh tahapan tersebut terintegrasi secara digital. Proses pencairan dana, penyusunan laporan keuangan, hingga pelaporan realisasi anggaran dapat dilakukan melalui satu sistem yang sama. Hal ini mempercepat proses kerja, mengurangi beban administrasi, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Efisiensi meningkat karena waktu dan biaya yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan menjadi lebih rendah dibandingkan hasil atau *output* yang diperoleh.

## Rasio Efektivitas

Bastian (2017) menyatakan bahwa rasio efektivitas adalah hubungan antara *output* dan tujuan di mana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan

prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi rasio efektivitas menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan targetnya.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Menurut Mahmudi (2016b), Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Kriteria efektivitas yaitu:

- a) Jika diperoleh nilai perbandingan kurang dari 100% ( $X < 100\%$ ) maka, tidak efektif.
- b) Jika diperoleh nilai perbandingan sama dengan 100% ( $X = 100\%$ ) maka, efektivitas berimbang.
- c) Jika diperoleh nilai perbandingan lebih dari 100% ( $X > 100\%$ ) maka, efektif.

Tabel 4. Rasio Efektivitas Kabupaten Wajo 2021-2023

Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi Anggaran Pendapatan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2021	1.471.383.401.992	1.469.701.973.295	99,88	Tidak Efektif
2022	1.460.089.873.730	1.439.414.593.642	98,58	Tidak Efektif
2023	1.499.566.680.226	1.519.047.240.030	101,29	Efektif

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 4 menunjukkan capaian pendapatan daerah terhadap target yang telah direncanakan selama tiga tahun terakhir. Tahun 2021 dan 2022 menunjukkan nilai efektivitas pendapatan sedikit di bawah 100%, yang dikategorikan sebagai "Tidak Efektif." Namun pada tahun 2023, capaian pendapatan melampaui target, yaitu dengan rasio 101,29%, sehingga masuk dalam kategori "Efektif." Hal ini menunjukkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pendapatan oleh pemerintah daerah, yang berdampak positif terhadap kestabilan fiskal.

Kondisi efektivitas yang meningkat ini memiliki implikasi penting bagi program pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Ketika pendapatan

daerah terealisasi secara optimal, maka alokasi anggaran untuk sektor non-komersial seperti penguatan sistem informasi keuangan menjadi lebih memungkinkan. SIPKD bukanlah program yang menghasilkan pendapatan secara langsung, namun memberikan kontribusi penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran. Oleh karena itu, efektivitas pendapatan yang tinggi akan memperkuat kapasitas fiskal untuk mendanai pengembangan dan pemeliharaan sistem ini secara berkelanjutan, termasuk pembaruan perangkat, peningkatan fitur aplikasi, dan pelatihan sumber daya manusia. Dengan dukungan fiskal yang memadai, pengembangan SIPKD dapat berjalan lebih konsisten dan terencana, serta selaras dengan prinsip *value for money* yang menjadi dasar dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Sisi efektivitas, sebelum SIPKD diimplementasikan, banyak laporan keuangan dari OPD yang disusun tidak tepat waktu atau tidak sesuai dengan format yang diharapkan. Hal ini membuat BPKPD kesulitan dalam menyusun laporan tahunan dan berdampak pada kualitas pengambilan keputusan serta penilaian dari auditor. Setelah penggunaan SIPKD, kualitas pelaporan meningkat secara signifikan karena laporan dari setiap OPD dapat dikirim dan dipantau secara *real-time*. Format pelaporan pun telah *distandarisasi* dalam sistem, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan. Dengan peningkatan ini, target pelaporan keuangan dapat dicapai secara lebih konsisten dan tepat waktu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program SIPKD telah mendukung pencapaian tujuan-tujuan keuangan daerah secara efektif.

## **SIMPULAN**

Bagian ini menyajikan kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Bagian Simpulan ditulis dalam satu bab dan tidak ada sub judul.

Tingkat rasio ekonomis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo selama 2021–2023 menunjukkan tren stabil dan cukup ekonomis, dengan

rincian: 93,24% pada 2021, turun menjadi 90,53% pada 2022, lalu naik kembali ke 92,57% pada 2023. Seluruh rasio berada di bawah 100%, menandakan penggunaan anggaran yang hemat dan efisien tanpa mengurangi kualitas barang atau jasa, serta mencerminkan penerapan prinsip pengadaan yang baik.

Tingkat rasio efisiensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo selama 2021–2023 menunjukkan kinerja cukup efisien, dengan nilai 88,21% pada 2021, turun menjadi 82,46% pada 2022, dan naik kembali ke 84,21% pada 2023. Seluruh rasio di bawah 100% mencerminkan penggunaan anggaran yang relatif optimal, minim pemborosan, serta tepat sasaran. Meskipun sempat menurun pada 2022, peningkatan di 2023 menunjukkan upaya perbaikan berkelanjutan dalam manajemen anggaran dan operasional.

Tingkat rasio efektivitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo selama 2021–2023 menunjukkan dinamika kinerja, dengan nilai 99,88% pada 2021, turun menjadi 98,58% pada 2022, dan meningkat signifikan menjadi 101,29% pada 2023. Rasio di bawah 100% pada 2021 dan 2022 mengindikasikan pelaksanaan anggaran belum efektif, sementara capaian di atas 100% pada 2023 menunjukkan keberhasilan dalam merealisasikan target anggaran. Fluktuasi ini mencerminkan adanya tantangan di dua tahun pertama, namun diikuti perbaikan strategis yang berdampak positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo disarankan untuk terus meningkatkan realisasi pendapatan melalui optimalisasi strategi penagihan, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan koordinasi antarinstansi, guna mencapai target dan meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan tiap tahun.

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi yang lebih mendalam untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tidak optimalnya realisasi anggaran, baik dari aspek eksternal seperti kondisi ekonomi dan regulasi, maupun internal seperti perencanaan, pengawasan, dan manajemen program, agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Akbar, F., Alamsyah, S., & Nugroho, G. W. (2024). *Analisis Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (Studi Kasus Implementasi Sipkd di BPKPD Kota Sukabumi)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2468>
- Alaslan, R. T. F. A., Abdurrahim, A. M., Sunaryanto, Sagena, R. F. U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik*. PT Global Eksekutif Teknologi
- Amin, Faradillah. (2019). *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam Persepektif Teoritis*. UB Press.
- Bastian, Indra. (2017). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Airlangga.
- Bastian, Indra. (2020). *Manajemen Keuangan Publik*. ANDI.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (4(th) ed.). SAGE.
- Da Cunha, A. A., Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 86–100. <https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1195>
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 72–88. <https://doi.org/10.35314/jam.v17i1.181>
- Fitra, Halkadri. (2019). *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. IRDH.
- Hadaryen, Y. A., & Sugiartono, E. (2021). Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Konsep Value For Money (Studi Kasus pada Kantor Desa Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(2), 134–140. <https://doi.org/2807-243X>
- Hidayat, W. W. (2018). *Dasar-Dasar Analisis Laporan Keuangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Imbaruddin, Amir. (2016). *Birokrasi, akuntabilitas, kinerja sebuah refleksi*. De La Macca.
- Irnawati, D. S., & Abidin, Z. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kota Makassar. 4, 403–416. <https://doi.org/10.33366/jmmni.v4i3.3009>
- Jadid, P., Husnan, L. H., & Wardani, L. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2018-2020. *Jurnal Keuangan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram (JRK)*, 1(1), 56–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jrk.v1i1.2108>
- Karina, L. A., & Ramadhani, W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Value*, 2(2), 71–82. <https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>
- Kementerian Keuangan. (2024, November 14). *Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan: <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2020). *SAP - Standar Akuntansi Pemerintahan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Mahmudi. (2016a). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Revi). UII.
- Mahmudi. (2016b). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Ketiga). UPP STIM YKPN.
- Manoppo, M., Ilat, V., & Tirayoh, V. Z. (2017). Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow Timur (Tahun Anggaran 2014-2015). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2297–2306. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16532>

- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Terbaru). ANDI.
- Moleong, L. Johannes. (2018). *Metodologi Penelitian kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, N. Andriany. (2023). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal AKTUAL*, 21(2), 1–10. <https://doi.org/10.47232/aktual.v21i2.382>
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. UB Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Pratama, V. Y., Syamsuddin, & Difa, F. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 149–155. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.411>
- Pratiwi, Y., & Pamungkas, B. (2018). Analisis Pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(1), 059–072. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v2i1.46>
- Pulungan, A. A. G., Octalin, I. S., & Kusumastuti, R. (2023). Pengukuran Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Pada Kinerja Keuangan PT.Telkon Indonesia Tbk (Periode 2020-2022). *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 247–261. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v2i2.984>
- Purnamasari, N. I., Antong, & Kasran, M. (2020). Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual Pada Kantor Bpkad Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2), 27–34. <https://doi.org/10.35906/ja001.v6i2.557>
- Purwanto. (2019). Variabel Dalam Pendidikan. *Teknодик*, 10(18), 1–20. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.554>
- Rahman, A., & Restiatun, R. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Kendaraan Bermotor Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Tpt) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kalimantan Barat. *Sebatik*, 27(2), 699–707. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2370>
- Ridha, Nikmatur. (2020). Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian. *Computer Graphics Forum*, 39(1), 672–673. <https://doi.org/10.1111/cgf.13898>
- Roflin, E., Liberty, I. A., & P. (2021). *Populasi, Sampel, Variabel dalam Penelitian Kedokteran*. NEM.
- Santoso, E. B., Prasetyo, A., & Gaol, L. L. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/10.31933/mwca7592>
- Setyaningrum, Amalia, R & Arsiwi, P. (2017). *Modul Praktikum Manufaktur Terintegrasi*. Universitas Dian Nuswantoro.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Aplhabet.
- Supriyanto, B. E. (2024, Agustus 31). *Kementerian Keuangan*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3723-transparansi-dan-akuntabilitas-penggunaan-anggaran-untuk-pemberdayaan-masyarakat.html>
- Tama, A. I. (2017). Perspektif Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(2), 221–235. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i2.940>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/jira.v10i4.3857>
- Daftar pustaka memuat sumber-sumber yang diacu di dalam penulisan artikel.